SATEDIK: Jurnal Sains, Teknik, Ekonomi, dan Pendidikan ISSN 3123-3074 (E)
Volume 03, Nomor 01, Januari 2027

PERDAGANGAN CENGKIH DAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS MUSLIM DI TERNATE PADA MASA AWAL ISLAMISASI: KAJIAN LITERATUR

Fatiha Laili Nur Azizah[1)], Zahra Ar Rohmatic[2)] Diah Novita Fardani[3)]

[1)] Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia
Email: azizah6470@gmail.com
[2)] Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia
Email: zahrarhmtc@gmail.com
[3)] Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, Indonesia
Email: diah.nf@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the role of the 16th-century spice trade network as the primary medium for the spread of Islam in the Indonesian Archipelago (Nusantara), as well as its impact on the socio-political dynamics of coastal societies. To achieve this objective, a historical research method was employed, consisting of four stages: heuristics (collection of secondary sources and maritime historiography), source criticism (verification of data validity), interpretation (synthesis of historical facts), and historiography (analytical historical writing). The results indicate that following the fall of Malacca in 1511, alternative trade routes emerged along the western coast of Sumatra, the Sunda Strait, the northern coast of Java, and the Maluku Islands. This condition fostered the rise of new port cities such as Aceh, Banten, Demak, Makassar, and Ternate-Tidore. The spread of Islam occurred peacefully and gradually (penetration pacifique) through the business ethics of Muslim traders, intermarriage, the establishment of Pekojan settlements, and the institutionalization of education in mosques and pesantren by sufi scholars. Furthermore, the spice trade strengthened the political and financial legitimacy of local rulers, triggering a structural transformation from Hindu-Buddhist kingdoms into sovereign Islamic maritime sultanates. The conclusion emphasized in this study is that the 16th-century spice trade was not merely an economic activity, but a central pillar of Islamic integration and maritime political consolidation in Nusantara against European expansion.

Keywords: Spice Trade; Spread of Islam; 16th-Century Nusantara; Coastal Ports; Maritime Sultanates.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan jaringan perdagangan rempah abad ke-16 sebagai medium utama penyebaran agama Islam di Nusantara, serta dampaknya terhadap dinamika sosio-politik masyarakat pesisir. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (historis) yang meliputi empat tahapan: heuristik (pengumpulan sumber sekunder dan historiografi maritim), kritik sumber (verifikasi keabsahan data), interpretasi (sintesis fakta sejarah), dan historiografi (penulisan sejarah analitis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca-jatuhnya Malaka pada tahun 1511, terbentuk rute niaga alternatif yang melintasi pantai barat Sumatera, Selat Sunda, pesisir utara Jawa, hingga Kepulauan Maluku. Kondisi ini mendorong kebangkitan bandar-bandar pelabuhan baru seperti Aceh, Banten, Demak, Makassar, dan Ternate-Tidore. Penyebaran Islam berlangsung secara damai dan gradual (penetration pacifique) melalui etika bisnis pedagang Muslim, perkawinan campuran, pembentukan permukiman Pekojan, serta pelembagaan pendidikan berbasis masjid dan pesantren oleh para ulama-sufi. Selain itu, aktivitas perdagangan rempah memperkuat legitimasi politik dan finansial para penguasa lokal, yang memicu transformasi struktur pemerintahan dari kerajaan Hindu-Buddha menjadi kesultanan-kesultanan maritim Islam yang berdaulat. Kesimpulan yang ditekankan dalam penelitian ini adalah bahwa perdagangan rempah abad ke-16 bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan pilar utama jaringan integrasi Islamisasi dan konsolidasi politik maritim Nusantara dalam menghadapi ekspansi bangsa Barat.

Kata Kunci: Perdagangan Rempah; Penyebaran Islam; Nusantara Abad ke-16; Pelabuhan Pesisir; Kesultanan Maritim.

PENDAHULUAN

Asia Tenggara secara historis berkembang menjadi kawasan dengan populasi penganut agama Islam terbesar di dunia, yang mana konsentrasi utamanya terpusat secara signifikan di wilayah budaya Melayu-Indonesia. Berbeda dengan kawasan Timur Tengah atau Asia Selatan yang dalam beberapa fase sejarahnya diwarnai ekspansi politik dan konflik militer, proses masuk serta berkembangnya ajaran Islam di Kepulauan Nusantara berlangsung secara bertahap, damai, dan non-konfrontatif melalui berbagai saluran interaksi kemanusiaan. Dalam konteks ini, jaringan perdagangan maritim memegang peranan kunci sebagai wahana utama sekaligus titik awal dari dinamika persebaran keagamaan tersebut. Sejak abad pertama Masehi, lalu lintas pelayaran internasional di sepanjang Jalur Sutra Maritim, khususnya yang melintasi koridor strategis Selat Malaka, telah menghubungkan dunia Islam di kawasan Arab, Persia, dan India dengan pusat-pusat peradaban di Asia Timur (Handoko, 2014).

Kepulauan Nusantara yang terbentang di tengah lintasan silang dunia ini berada pada posisi geografis yang amat strategis serta kaya akan keanekaragaman komoditas alam. Keunggulan komparatif ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Nusantara sebagai pusat persinggahan, tempat perbekalan, hingga arena interaksi kultural yang sangat intensif bagi para pedagang Muslim dari berbagai penjuru dunia (Ari, Maulana, Farhanan, Aisyi, & Nurjanah, 2024; Sadiida, Hamidah, & Kusuma, 2025; Syafiera, 2016).

Memasuki abad ke-16, keterlibatan Nusantara dalam peta pelayaran global tidak lagi sekadar menjadi lintasan transito, melainkan mengalami pergeseran struktur dan peningkatan kapasitas perdagangan maritim yang amat signifikan. Reorientasi lanskap geopolitik dan ekonomi maritim ini dipicu oleh sebuah peristiwa monumental, yakni jatuhnya emporium Malaka ke tangan bangsa Portugis pada tahun 1511. Jatuhnya benteng perdagangan utama tersebut, yang diiringi oleh kebijakan monopoli serta persaingan militer, mendorong para pedagang Muslim untuk mengalihkan rute pelayaran mereka demi menghindari pengawasan Portugis. Pada saat yang bersamaan, melonjaknya permintaan pasar internasional terhadap komoditas rempah-rempah unggulan seperti cengkeh, pala, dan lada memicu terbukanya rute-rute pelayaran alternatif di sepanjang perairan Nusantara. Dinamika ini memacu lahir dan tumbuhnya bandar-bandar pelabuhan baru sebagai emporium alternatif di sepanjang wilayah pesisir, mulai dari Kesultanan Aceh di ujung barat Sumatera, Banten, Demak, Tuban, dan Gresik di pesisir utara Jawa, Makassar di Sulawesi Selatan, hingga jajaran Kesultanan di Kepulauan Maluku (Ririmasse, 2017).

Dalam konteks dinamika ekonomi-politik maritim abad ke-16 yang kian kompleks ini, kehadiran para pedagang Muslim tidak hanya terbatas sebagai aktor transaksi niaga semata, melainkan bertindak secara efektif sebagai agen transformasi kultural dan religius yang menggerakkan roda Islamisasi di kawasan pesisir (Sadiida et al., 2025; Syafiera, 2016).

Aktivitas penyebaran ajaran Islam yang digerakkan melalui jaringan perdagangan rempah tersebut berlangsung secara multidimensional dan berbasis jaringan (*network-based*), di mana aspek ekonomi, sosial, dan keagamaan saling berkelindan secara organis. Interaksi harian yang terjalin erat di pelabuhan-pelabuhan persinggahan serta pasar-pasar pesisir melahirkan berbagai mekanisme sosial-budaya yang efektif melanggengkan ajaran Islam. Mekanisme ini mencakup terjadinya pernikahan campuran antara para pedagang Muslim asing dengan wanita-wanita lokal tempatan, pembentukan permukiman khusus komunitas Muslim (*kampung dagang* atau Pekojan), hingga proses akulturasi budaya yang luwes tanpa merusak atau mengeksklusi tradisi setempat (Sanjaya et al., 2026).

Di samping ikatan sosial-kemasyarakatan tersebut, nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran dalam menimbang, keadilan bertransaksi, dan keterjagaan amanah yang ditampilkan secara konsisten oleh para pedagang Muslim dalam aktivitas niaga memfasilitasi penerimaan ajaran Islam secara gradual dan simpatik oleh masyarakat lokal maupun kalangan elit istana. Proses penguatan akidah ini semakin diperkokoh oleh kehadiran para ulama, mubaligh, dan penganut tarekat yang menyertai jejaring niaga maritim tersebut. Mereka secara aktif melembagakan ajaran Islam melalui pendirian sarana ibadah berupa masjid-masjid pesisir serta pusat-pusat pendidikan awal seperti surau dan pesantren awal yang mendidik kader-kader da'i lokal (Ari et al., 2024).

Dampak berkelanjutan dari akumulasi interaksi sosial-keagamaan dan aktivitas ekonomi maritim ini pada akhirnya bertransformasi menjadi pilar utama dalam pembentukan, konsolidasi, serta penguatan legitimasi politik kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara (Ipaenin, 2018).

Pertumbuhan komunitas Muslim yang kian pesat dan dominan di kawasan pesisir secara bertahap mendorong lahirnya pusat-pusat kekuasaan politik baru yang berbasis maritim. Kesultanan-kesultanan seperti Samudera Pasai, Demak, Aceh Darussalam, Ternate, Tidore, hingga Gowa-Tallo berhasil mengambil alih kendali atas rute-rute niaga strategis, sekaligus memanfaatkan posisi politik mereka untuk mempercepat penyiaran Islam ke wilayah-wilayah pedalaman yang lebih luas. Dengan demikian, dinamika komersialisasi perdagangan rempah dan proses penyebaran agama Islam pada abad ke-16 bukanlah dua fenomena yang berdiri sendiri, melainkan merupakan fenomena historis yang saling berkelindan, menguatkan, dan terintegrasi secara utuh dalam jejaring maritim global (Sadiida et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang historis dan kompleksitas hubungan antarunsur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana jaringan perdagangan maritim dan komoditas rempah pada abad ke-16 berfungsi sebagai medium penyebaran Islam di Nusantara, serta bagaimana peran multidimensi para pedagang Muslim dalam memengaruhi dan mentransformasi struktur sosial, ekonomi, dan politik di kawasan pesisir (Azis, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (metode historis) yang bersifat deskriptif-kualitatif.

Metode ini digunakan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan kritis berdasarkan jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan. Prosedur penelitian meliputi empat tahapan utama:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang relevan dengan topik perdagangan rempah dan penyebaran Islam abad ke-16. Sumber yang digunakan terdiri dari:

Jurnal Penelitian: Artikel ilmiah berkala yang mengkaji jaringan perdagangan maritim, peranan pedagang Muslim, dan proses Islamisasi Nusantara.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Tahap verifikasi dilakukan untuk menguji keabsahan dan keandalan data. Dalam penelitian ini difokuskan pada kritik intern, yaitu menilai dan membandingkan kredibilitas serta kevalidan isi materi dari berbagai literatur dan dokumen sejarah yang telah dikumpulkan guna memperoleh fakta sejarah yang konsisten dan akurat.

3. Interpretasi (Penafsiran Fakta)

Tahap interpretasi merupakan proses menafsirkan dan menganalisis fakta-fakta sejarah yang telah lolos dari proses verifikasi. Data mengenai jalur perdagangan, komoditas rempah, interaksi sosial-budaya pedagang Muslim, dan dinamika politik kerajaan Islam dihubungkan secara sintetis untuk melihat keterkaitan kausalitas dalam proses Islamisasi maritim Nusantara.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Tahap akhir adalah menyajikan seluruh hasil analisis dan interpretasi dalam bentuk sintesis penulisan sejarah yang sistematis, kronologis, dan analitis-kualitatif mengenai peranan perdagangan rempah dan pedagang Muslim dalam penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-16.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peta Jalur Perdagangan Rempah dan Pelabuhan Utama Abad ke-16 (Hamid, 2021).

Pada abad ke-16, lanskap geopolitik dan peta perdagangan maritim di Nusantara mengalami rekonfigurasi pasca-jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Penguasaan Portugis atas Selat Malaka serta penerapan kebijakan monopoli dan tindakan militeristik mendesak para pedagang Muslim, baik yang berasal dari Arab, Persia, India, maupun pedagang antarisla Nusantara untuk mengalihkan orientasi pelayaran mereka. Kondisi ini secara sistematis mendorong pembukaan dan pengembangan rute-rute pelayaran alternatif demi menghindari monopoli ekonomi serta potensi konflik bersenjata dengan armada Barat (Ari et al., 2024; Sadiida et al., 2025; Syafiera, 2016).

a. Rute Pelayaran dan Jaringan Maritim

Rute alternatif yang mengalami perkembangan pesat membentang mengitari pantai barat Sumatera, mencakup pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Barus, Pariaman, hingga Bengkulu. Armada niaga kemudian melintasi perairan Selat Sunda menuju kota-kota pelabuhan di sepanjang pesisir utara Jawa (Pasisir), lalu melanjutkan pelayaran ke arah timur melintasi Laut Jawa dan Laut Banda hingga tiba di Kepulauan Maluku dan Banda, pusat produsen utama komoditas cengkeh dan pala dunia. Lintasan maritim ini tidak sekadar berfungsi sebagai koridor logistik pengangkutan barang niaga dan pasokan pangan, melainkan bertransformasi menjadi jaringan komunikasi lintas budaya yang dinamis. Melalui interaksi intensif di sepanjang rute ini, proses penyebaran dan pelembagaan ajaran agama Islam berlangsung secara akseleratif di wilayah pesisir Nusantara (Ari et al., 2024).

b. Pertumbuhan Bandar Pelabuhan Utama

Pergeseran poros pelayaran dan restrukturisasi jaringan niaga internasional melahirkan kebangkitan bandar-bandar pelabuhan baru yang tumbuh sebagai emporium penting di Nusantara (Handoko, 2017):

1) Aceh Darussalam: Tumbuh pesat menjadi bandar transito utama di kawasan barat Nusantara untuk menggantikan posisi Malaka. Selain menguasai jalur perdagangan lada dan menggalang kerja sama diplomasi maritim berskala internasional, Aceh berkembang menjadi pusat keilmuan dan syiar Islam terkemuka yang dikenal sebagai Serambi Mekkah.
2) Banten dan Demak: Banten berkembang di posisi strategis pintu masuk Selat Sunda sebagai pelabuhan lada internasional yang menghubungkan jaringan niaga dunia tanpa melintasi Selat Malaka. Sementara itu, Kesultanan Demak beserta jaringan pelabuhan pelapisnya di pesisir utara Jawa (Cirebon, Tuban, dan Gresik) memegang kendali atas distribusi beras dan rempah-rempah, sekaligus menjadi basis utama penyebaran Islam di Pulau Jawa.
3) Makassar (Gowa-Tallo): Berperan sebagai bandar transito bebas (*open port*) di kawasan tengah Nusantara yang menghubungkan rute pelayaran dari Jawa, Melayu, dan Nusa Tenggara menuju kepulauan produsen rempah di timur.
4) Ternate dan Tidore: Berdiri sebagai dua bandar utama di Kepulauan Maluku yang bertindak sebagai pusat pengumpul (*hub*) dan pemasok utama komoditas cengkeh serta pala untuk pasar dunia (Syafiera, 2016).

2. Mekanisme Penyebaran Islam Melalui Aktivitas Perdagangan (Sadiida et al., 2025).

Penyebaran agama Islam di sepanjang jejaring perdagangan rempah pada abad ke-16 berlangsung melalui pendekatan kultural yang bersifat damai, gradual, dan

inklusif (penetration pacifique). Proses Islamisasi ini tidak dilakukan melalui jalur penaklukan militer maupun pemaksaan ideologi, melainkan meresap secara intuitif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir. Dalam dinamika sosial-ekonomi maritim tersebut, terdapat beberapa saluran dan mekanisme sosial utama yang menjadi perantara efektif dalam proses transmisi ajaran Islam:

a. Interaksi Ekonomi dan Etika Bisnis Muslim

Aktivitas transaksi niaga harian di pasar-pasar pesisir dan bandar pelabuhan berfungsi sebagai sarana diplomasi agama yang sangat substantif dan efektif. Para pedagang Muslim tidak sekadar bertindak sebagai aktor ekonomi, melainkan juga mempraktikkan etika bisnis Islami secara konsisten. Mereka menampilkan karakter personal dan kebiasaan bersikap jujur, menegakkan keadilan dengan menimbang serta mengukur barang niaga secara presisi, menghindari praktik riba, serta senantiasa memelihara komitmen amanah dalam setiap perjanjian dagang. Sikap profesional, integritas moril, dan keluhuran budi pekerti ini secara langsung memikat simpati serta membangun rasa percaya (trust) yang mendalam, baik dari kalangan rakyat biasa, sesama pedagang lokal, hingga para penguasa dan elitis tempatan. Interaksi bisnis yang didasari atas nilai-nilai moralitas Islam ini menjadi fondasi awal penerimaan ajaran Islam secara sukarela dan tanpa paksaan.

b. Perkawinan Campuran dan Pembentukan Permukiman (Pekojan)

Dinamika pelayaran maritim yang sangat bergantung pada pola angin muson (monsoon) mengharuskan para pedagang Muslim asing menetap untuk sementara waktu (waiting for the monsoon) di kota-kota pelabuhan Nusantara. Keberadaan mereka dalam jangka waktu yang relatif lama mendorong terbentuknya pemukiman-pemukiman khusus di area pesisir yang dikenal sebagai Pekojan atau Kampung Arab/Melayu. Di kawasan pemukiman ini, banyak di antara para pedagang kaya dan berpengaruh menjalin ikatan perkawinan campuran dengan putri-putri bangsawan, keluarga penguasa lokal, maupun wanita dari kalangan masyarakat setempat. Melalui ikatan pernikahan ini, secara otomatis terjadi proses Islamisasi terhadap keluarga pihak wanita. Hal ini tidak hanya memperluas basis komunitas Muslim di tingkat tapak, tetapi juga membentuk jaringan kekerabatan strategis yang secara signifikan memperkokoh posisi dan pengaruh sosial-politik Islam di lingkungan elit istana.

c. Kehadiran Ulama, Sufi, dan Pendirian Lembaga Pendidikan

Jaringan niaga dan rute pelayaran maritim rempah juga dimanfaatkan secara optimal oleh para ulama, mubaligh, dan penganut tarekat (sufi) untuk bermigrasi, berkelana, dan menjalankan misi syiar Islam. Para tokoh sufi ini menerapkan pendekatan dakwah yang sangat fleksibel, simpatik, dan adaptif terhadap kearifan serta tradisi lokal setempat, sehingga ajaran Islam dapat diserap dengan mudah oleh masyarakat tanpa menimbulkan gejolak kultural. Untuk melanggengkan dan memperdalam pemahaman keagamaan komunitas yang baru terbentuk, didirikan sarana peribadatan dan pusat kegiatan sosial berupa masjid dan surau di sekitar bandar pelabuhan serta permukiman Muslim. Lembaga-lembaga peribadatan ini kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pendidikan keagamaan awal (seperti jaringan pesantren pesisir) yang mencetak kader-kader da'i lokal untuk menyebarkan Islam lebih jauh ke wilayah pedalaman Nusantara.

3. Peran Pedagang Muslim dalam Dinamika Sosio Politik Kerajaan Islam

Aktivitas ekonomi dan jejaring niaga yang dibangun oleh para pedagang Muslim tidak berhenti pada ranah komersial maupun syiar keagamaan semata, melainkan memberikan dampak struktural yang sangat mendalam terhadap lanskap dan dinamika politik di Nusantara pada abad ke-16. Keberadaan jaringan perdagangan maritim yang kuat menjadikan para pedagang Muslim sebagai aktor kunci yang memengaruhi kebijakan strategis, struktur birokrasi, serta arah artikulasi politik kerajaan-kerajaan pesisir.

a. Dukungan Finansial dan Logistik

Kerajaan-kerajaan Islam di wilayah pesisir memperoleh sumber pendapatan negara yang sangat berlimpah melalui penarikan bea cukai pelabuhan, tata kelola komoditas ekspor rempah-rempah bernilai tinggi, serta pemungutan pajak perdagangan yang dikelola secara terstruktur oleh komunitas Muslim. Akumulasi modal dan limpahan kekayaan materiil ini menjadi fondasi finansial yang krusial bagi para penguasa tempatan. Oleh para raja dan sultan pesisir, cadangan kapital tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat ketahanan nasional dan stabilitas politik. Pendapatan ini dialokasikan untuk membiayai pembangunan serta modernisasi armada maritim yang tangguh, memperkuat sarana pertahanan pelabuhan, serta membiayai operasionalisasi birokrasi pemerintahan yang semakin kompleks. Selain itu, kekuatan finansial ini memfasilitasi pembentukan jaringan logistik perang dan aliansi strategis antar-pelabuhan guna mempertahankan kedaulatan wilayah maritim dari ancaman ekspansi asing.

b. Integrasi Islam ke dalam Elite Birokrasi

Banyak di antara para pedagang Muslim yang tidak hanya memiliki modal finansial yang besar, tetapi juga berpendidikan tinggi, menguasai berbagai bahasa asing, serta berilmu dan berpengalaman dalam tata kelola diplomasi internasional. Kondisi ini mendorong para penguasa lokal untuk merekrut dan mengangkat mereka ke dalam lingkaran inti elit birokrasi istana. Mereka dipercaya memangku

jabatan-jabatan strategis pemerintahan, seperti Syahbandar (otoritas tertinggi pengawas pelabuhan dan lalu lintas perdagangan), diplomat penterjemah utusan luar negeri, hingga penasihat keagamaan dan politik kesultanan. Integrasi para tokoh Muslim ke dalam struktur birokrasi ini mempercepat proses pengadopsian dan formalisasi hukum Islam (fiqh muamalah dan tata negara) ke dalam sistem hukum kerajaan, sehingga tata kelola pemerintahan dan regulasi perdagangan secara bertahap bertransformasi berlandaskan prinsip-prinsip keadilan Islami.

c. Transisi Penguasa dan Pembentukan Kesultanan

Dominasi sosio-ekonomi yang dipegang oleh komunitas pedagang Muslim di pusat-pusat emporium pesisir menciptakan pergeseran keseimbangan kekuasaan (balance of power) yang signifikan. Pengaruh kultural dan ekonomi yang semakin mengakar ini mendorong para adipati, penguasa pelabuhan, hingga raja-raja pesisir untuk secara sukarela memeluk agama Islam demi mengamankan jalur niaga dan menggalang solidaritas politik. Proses konversi agama para elit penguasa ini memicu pergeseran kekuasaan yang besar di Nusantara, yaitu transisi dari helat kekuasaan kerajaan-kerajaan pedalaman bercorak Hindu-Buddha (seperti meredupnya pengaruh politik Majapahit) menuju kemunculan kesultanan-kesultanan maritim Islam baru yang berdaulat secara penuh. Kesultanan-kesultanan maritim ini berkembang pesat menjadi entitas politik yang mandiri, berdaya saing tinggi, serta aktif menjalin diplomasi dan aliansi politik-militer internasional di kawasan Samudra Hindia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perdagangan rempah dan penyebaran Islam di Nusantara pada abad ke-16, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jaringan Perdagangan Maritim dan Rute Alternatif: Perdagangan rempah pada abad ke-16 memegang peranan krusial sebagai medium utama persebaran Islam di Nusantara. Pasca jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, terbentuk rute-rute pelayaran baru yang melintasi pantai barat Sumatera, Selat Sunda, pesisir utara Jawa, hingga Kepulauan Maluku. Dinamika ini mendorong kemunculan bandar-bandar pelabuhan baru seperti Aceh, Banten, Demak, Makassar, serta Ternate-Tidore sebagai pusat niaga maritim sekaligus pusat syiar Islam.
2. Mekanisme Islamisasi Multidimensional: Proses penyebaran Islam di sepanjang jaringan perdagangan rempah berlangsung secara damai, gradual, dan inklusif (penetration pacifique). Para pedagang Muslim menjalankan fungsi sebagai agen transformasi sosial melalui penerapan etika bisnis yang jujur dan adil, pembentukan perkawinan campuran dengan bangsawan/masyarakat lokal, serta pembangunan pemukiman Muslim (Pekojan). Kehadiran para ulama dan sufi yang menyertai jaringan niaga ini turut memperkokoh pelembagaan Islam melalui pendirian masjid dan lembaga pendidikan awal di wilayah pesisir.
3. Pengaruh Sosio-Politik dan Pembentukan Kesultanan: Aktivitas ekonomi maritim berbasis komoditas rempah memperkuat struktur finansial dan legitimasi politik penguasa pesisir. Integrasi komunitas dan pedagang Muslim ke dalam birokrasi pemerintahan (seperti jabatan Syahbandar) memicu transformasi politik dari kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha menuju berdirinya kesultanan-kesultanan maritim Islam yang berdaulat. Selain itu, jaringan perdagangan rempah menjadi sarana konsolidasi dan solidaritas politik kesultanan Islam di Nusantara dalam menghadapi ekspansi serta monopoli perdagangan bangsa Eropa pada abad ke-16.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak penyandang dana/lembaga pemberi beasiswa, para penyedia data dan arsip kebudayaan, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan teknis selama proses penelitian serta penyusunan makalah ini berlangsung hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Ari, F. L. W., Maulana, M. S., Farhanan, F., Aisyi, R. R., & Nurjanah. (2024). Jalur Perdagangan dan Penyebaran Islam di Asia Tenggara. *JIS: Jurnal Sejarah Islam*, *3*(2).

Azis, M. N. I. (2019). Islamisasi di Kawasan Laut Sulawesi pada Abad ke-19. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, *5*(1).

Hamid, A. R. (2021). Jalur Rempah dan Islamisasi Nusantara: Jaringan Samudera Pasai Abad XIII-XVI. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, *23*(3).

Handoko, W. (2014). Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan Hoamoal di Seram Bagian Barat. *Kapata Arkeologi*, *10*(2), 99–112. https://doi.org/https://doi.org/10.24832/kapata.v10i2.226

Handoko, W. (2017). Ekspansi Kekuasaan Islam Kesultanan Ternate di Pesisir Timur Halmahera Utara. *Kapata Arkeologi*, *13*(1), 95–108.

Ipaenin, S. (2018). Dakwah Kultural dan Islamisasi di Ternate. *Al-Mishbah*, *14*(1), 57–73.

Ririmasse, M. N. (2017). Sebelum Jalur Rempah: Awal Interaksi Niaga Lintas Batas di Maluku dalam Perpektif Arkeologi. *Kapata Arkeologi*, *13*(1), 47–54. https://doi.org/https://doi.org/10.24832/kapata.v13i1.388

Sadiida, A., Hamidah, U., & Kusuma, L. N. (2025). Perdagangan Rempah dan Penyebaran Islam: Analisis Peran Pedagang Muslim di Nusantatar Abad ke-16. *Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, *3*(4), 48–61.

Sanjaya, D., Hutagaol, E. V., Andira, S., Tambunan, T. A., Simanjuntak, T. Y., & Lukitoyo, P. S. (2026). Transformasi Sosial dan Perdagangan dalam Proses Islamisasi di Maluku. *JCRD: Journal of Citizen Research and Development*, *3*(1).

Syafiera, A. (2016). Perdagangan di Nusantara Abad ke-16. *AVATARA: Journal Pendidikan Sejarah*, *4*(3).